

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PEMBINAAN
ANAK PUTUS SEKOLAH DI UPT. PELAYANAN
SOSIAL ANAK REMAJA TANJUNG
MORAWA**

SKRIPSI

OLEH :

INDAH BERTUA SIANTURI

158520037



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN**

2020

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/10/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)1/10/20

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PEMBINAAN
ANAK PUTUS SEKOLAH DI UPT. PELAYANAN
SOSIAL ANAK REMAJA TANJUNG
MORAWA**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area**

OLEH :

INDAH BERTUA SIANTURI

158520037

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2020**

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Anak Putus Sekolah
Di UPT Pelayanan Sosial Anak Remaja Tanjung Morawa

Nama : Indah Bertua Sianturi

NPM : 158520037

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing


Dr. Abdul Kadir, SH, M.Si
Pembimbing I


Drs. H. Irwan Nst, S.Pd, MAP
Pembimbing II


Nina Angelia S.sos, M.si
Ketua Prodi Administrasi Publik
Universitas Medan Area




Dr. Heri Kusmanto, MA
Dekan FISIP
Universitas Medan Area

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 16 Desember 2019



Indah Bertua Sianturi

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PEMBINAAN ANAK PUTUS SEKOLAH DI UPT. PELAYANAN SOSIAL ANAK REMAJA TANJUNG MORAWA

Indah Bertua Sianturi¹⁾, Abdul Kadir²⁾, Irwan Nasution³⁾

¹⁾Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Medan Area, Indonesia

Dalam upaya mengurangi remaja putus sekolah, diperlukan kerjasama dari berbagai pihak, baik dari pemerintah maupun masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan pelayanan sosial. Pelayanan sosial tersebut bertujuan agar remaja putus sekolah tetap mendapatkan pendidikan di luar sekolah yang dapat dijadikan bekal untuk memperoleh pekerjaan sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Pelayanan sosial yang diberikan tentunya harus sesuai dengan kebutuhan remaja putus sekolah. Pelayanan sosial yang dapat diberikan yaitu berupa pembinaan bagi remaja putus sekolah melalui bimbingan. Bimbingan yang diberikan yaitu bimbingan mental agama, bimbingan sosial dan fisik, bimbingan keterampilan dan Praktek Belajar Kerja (PBK). Penelitian ini dilakukan pada Unit Pelaksanaan Teknis Pelayanan sosial anak remaja Tanjung Morawa menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Sedangkan sumber data dalam penelitian ini adalah pegawai di UPT Pelayanan Sosisal Anak Remaja. Teknik Penarikan yang digunakan adalah teknik “*purposive sampling*”. Teknik Pengumpulan Data yang digunakan melalui wawancara, obeservasi dan analisis dokumen serta mencatat dan merekam. Teknik Analisis Data yang digunakan penelitian ini adalah teknik analisa data kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Program Pembinaan Anak Putus Sekolah Di UPT Pelayanan Sosial Anak Remaja (PSAR) Tanjung Morawa Tahun 2018. Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Anak Putus Sekolah Di UPT Pelayanan Sosial Anak Remaja Tanjung Morawa Tahun 2018 dilakukan sudah terlaksana cukup baik. Hanya kurangnya fasilitas dan dana untuk menjalankan pembinaan bagi anak putus sekolah.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Pembinaan anak putus sekolah.

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PEMBINAAN ANAK PUTUS SEKOLAH DI UPT. PELAYANAN SOSIAL ANAK REMAJA TANJUNG MORAWA

Indah Bertua Sianturi¹⁾, Abdul Kadir²⁾, Irwan Nasution³⁾

¹⁾Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Medan Area, Indonesia

In an effort to reduce teenage dropouts, collaboration is needed from various parties, both from the government and the community. One of the efforts made is to provide social services. The social service aims to keep out of school teenagers getting education outside of school that can be used as provisions to obtain work so that they can meet their needs independently. The social services provided must of course have to be in accordance with the needs of teenagers dropping out of school. Social services that can be provided are in the form of coaching for school dropouts through guidance. Guidance provided is religious mental guidance, social and physical guidance, skills guidance and Job Learning Practices (PBK). This research was conducted at the Technical Implementation Unit of Tanjung Morawa adolescent social services using qualitative descriptive research methods. While the source of the data in this study were employees at the UPT Sosial Services for Adolescent Children. The withdrawal technique used is the "purposive sampling" technique. Data collection techniques used through interviews, observation and document analysis as well as recording and recording. Data Analysis Techniques used in this study are qualitative data analysis techniques. This study aims to find out how the implementation of the policy of the School Dropout Guidance Program in UPT Tanjung Morawa Social Services for Teenagers in 2018. The implementation of the Policy for School Dropping Guidance Programs at the UPT Tanjung Morawa Teenage Social Services Year 2018 has been done quite well. Only the lack of facilities and funds to run coaching for school dropouts.

Keywords : Policy, Implementation, Dropout Child Development.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat serta karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PEMBINAAN ANAK PUTUS SEKOLAH DI UPT. PELAYANAN SOSIAL ANAK REMAJA TANJUNG MORAWA.

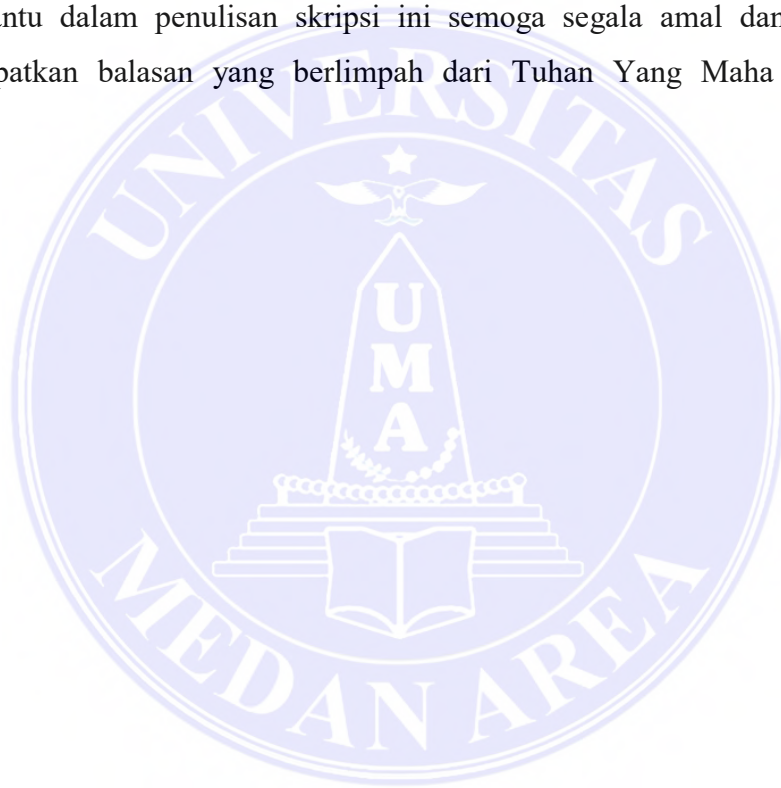
Dalam penulisan skripsi ini, Penulis selalu mendapatkan bimbingan, dorongan, serta semangat dari banyak pihak. Oleh karena itu Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area
2. Bapak Dr. Heri Kusmanto, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
3. Ibu Nina Angelia S.sos, M.si sebagai Kepala Prodi Ilmu Administrasi Publik yang telah memberikan saya banyak pelajaran dan masukan selama berkuliah.
4. Bapak Dr. Abdul Kadir SH,M.Si selaku dosen pembimbing I skripsi yang telah menyediakan waktu dan kesabaran untuk membimbing dan memberikan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Drs. H. Irwan Nasution, MAP sebagai dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan dalam penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen, Pegawai dan Staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area yang telah banyak membantu kelancaran perkuliahan dan juga kelancaran administrasi kepada penulis.
7. Kedua orangtua yang telah memberikan dorongan semangat, motivasi dan doa sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Buat saudara laki-laki Agus Freddy Sianturi dan saudara perempuan Dara Meidy Sianturi penulis yang selalu mendukung dan membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Buat teman terbaik penulis Frans Yus Mori Silitonga yang selalu memberikan semangat, waktu , motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Buat sahabat-sahabat penulis khususnya Ayu, Berliana, Ester dan Tio yang selalu mendukung dan membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Buat teman-teman di FISIPOL UMA Angkatan 2015, khususnya Romika sinaga yang selalu memberi semangat dan waktu dalam membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya, Penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak dan apabila ada yang tidak disebutkan Penulis mohon maaf, dengan besar harapan semoga skripsi yang ditulis oleh Penulis ini dapat bermanfaat khususnya bagi Penulis sendiri dan umumnya bagi pembaca. Bagi para pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini semoga segala amal dan kebbaikannya mendapatkan balasan yang berlimpah dari Tuhan Yang Maha Esa, Amiiin.



DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tinjauan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	5
BAB II LANDASAN TEORI	6
2.1 Implementasi	6
2.1.1 Pengertian Implementasi	6
2.1.2 Tahapan Implementasi	6
2.2 Pengertian Kebijakan	9
2.3 Proses Kebijakan	10
2.4 Program Pembinaan.....	11
2.3.1 Pengertian Program	11
2.3.2 Pengertian Pelatihan	12
2.5 Pengertian Sumber Daya	13
2.6 Pengertian Anak	13
2.7 Pengertian Remaja Putus Sekolah	14
2.8 Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah.....	15
2.8.1 Faktor Yang Mempengaruhi Anak Putus Sekolah	15

2.9 Implementasi Pembinaan Anak Putus Sekolah.....	15
2.10 Penelitian Terdahulu	17
2.11 Kerangka Pemikiran	20
BAB III METODE PENELITIAN	24
3.1 Jenis Penelitian, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian	24
3.1.1 Jenis Penelitian	24
3.1.2 Sifat Penelitian	24
3.1.3 Lokasi Penelitian.....	25
3.1.4 Waktu Penelitian	25
3.2 Informan Penelitian.....	26
3.3 Teknik Pengumpulan Data	26
3.4 Teknik Analisa Data	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
4.1 Hasil Penelitian	30
4.1.1 Sejarah Singkat.....	30
4.1.2 Visi dan Misi	31
4.1.3 Tujuan.....	32
4.1.4 Struktur Organisasi	34
4.2 Deskripsi Hasil Penelitian	40
4.2.1 Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Anak Putus Sekolah.....	41
4.2.2 Pembinaan dan Keterampilan Remaja	44
4.2.3 Sasaran Pelayanan	49
4.2.4 Persyaratan	50
4.2.5 Proses Pelayanan	50
4.2.6 Fasilitas Pelayanan	53
4.2.7 Waktu Pelayanan	53
4.2.8 Hasil yang diharapkan.....	53
4.2.9 Daftar Peserta	53

4.3 Jaringan Kerjasama.....	58
4.3.1 Permasalahan Yang Terjadi	58
4.3.2 Faktor Pendorong Dan Penghambat.....	59
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	63
5.1 kesimpulan	63
5.2 Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	67
DOKUMENTASI	69
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan pada dasarnya adalah serangkaian kegiatan yang diusahakan secara sadar yang bertujuan mengembangkan kepribadian dan kemampuan baik dilaksanakan di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Pendidikan mempunyai peran yang sangat penting dalam membangun sebuah negara. Sumber daya manusia dapat dikembangkan menjadi lebih berkualitas melalui pendidikan. Pendidikan menjadi motor penggerak kelangsungan hidup dalam konteks politik, sosial, ekonomi, maupun budaya. Pendidikan dapat membawa individu menuju kehidupan yang lebih baik.

Putus sekolah secara umum dapat diartikan sebagai orang atau anak yang keluar dalam suatu sistem pendidikan sebelum mereka menamatkan pendidikan sesuai dengan jenjang waktu sistem persekolahan yang diikuti. Putus sekolah menjadi masalah yang cukup serius karena ironis dengan usaha pemerintah yang meneruskan untuk memajukan pendidikan. Putus sekolah merupakan jurang yang menghambat anak untuk mendapatkan haknya.

Fenomena banyaknya anak putus sekolah merupakan persoalan sosial yang kompleks. Hidup menjadi anak putus sekolah memang bukan merupakan pilihan yang menyenangkan, karena mereka berada dalam kondisi yang tidak memiliki masa depan yang jelas, dimana keberadaan mereka seringkali menjadi “masalah” bagi banyak pihak yaitu keluarga, masyarakat dan negara. Tetapi, perhatian terhadap nasib anak putus sekolah tampaknya begitu besar. Padahal mereka adalah saudara kita, mereka juga harus dilindungi, dijamin hak-haknya, sehingga tumbuh-kembangnya menjadi manusia dewasa yang bermanfaat, beradab dan bermasa depan cerah.

Putus sekolah disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu faktor ekonomi, psikologis, serta lingkungan sosial yang menjadi pemicu seorang anak tidak dapat melanjutkan pendidikannya. Kebanyakan anak-anak yang mengalami putus sekolah dikarenakan faktor ekonomi, namun tidak banyak pula anak-anak yang mengalami putus sekolah dikarenakan faktor psikologis dan lingkungan sosial.

Lemahnya keadaan ekonomi orang tua adalah salah satu faktor penyebab terjadinya anak putus sekolah.

Apabila keadaan ekonomi orang tua kurang mampu, maka kebutuhan anak dalam bidang pendidikan tidak dapat terpenuhi dengan baik. Sebaliknya kebutuhan yang cukup bagi anak hanyalah didasarkan kepada kemampuan ekonomi dari orang tuanya, yang dapat terpenuhinya segala keperluan kepentingan anak terutama dalam bidang pendidikan.

Realitanya masih ada sebagian orang tua yang tidak memperhatikan pendidikan bagi anak. Menurut laporan tahun 2018 di UPT pelayanan sosial anak remaja memiliki jumlah anak putus sekolah mencapai angka 79 anak. Anak putus sekolah menjadi masalah yang cukup serius karena ironisnya dengan usaha pemerintah yang gencar untuk memajukan pendidikan nasional. Pendidikan yang diupayakan oleh pemerintah sebagai usaha untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dapat dilihat dari program pembinaan anak putus sekolah.

Dalam rangka memperluas pengetahuan, pendidikan dan keterampilan perlu diperhatikan bagi anak yang putus sekolah bertempat tinggal di kota Medan diberi kesempatan. Dalam bidang Pendidikan pemerintah membuat kebijakan yaitu membuat Undang-Undang NO.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu: Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan merupakan kegiatan yang bertujuan, meningkatkan kemampuan seseorang dalam segala bidang melalui pengetahuan, keterampilan, dan sikap.

Sesuai dengan pernyataan diatas maka upaya yang dilakukan oleh pemerintah di bidang kesejahteraan dan memberikan perlindungan dan pembinaan terhadap anak yang kurang mampu dan yang putus sekolah adalah penyediaan Lembaga-lembaga pelayanan sosial. Sebagai wujud dari pemahaman terhadap ketentuan tersebut, maka didirikanlah panti asuhan yang bertujuan untuk menyantuni, memelihara dan mendidik anak-anak terlantar yang putus sekolah.

Satu diantaranya yaitu panti sosial yang didirikan oleh pemerintah yang bekerjasama dengan Dinas Kesejahteraan dan Sosial Provinsi Sumatera Utara adalah Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pelayanan Sosial Anak Remaja (PSAR)

yang merupakan tempat untuk membina anak remaja yang mengalami putus sekolah. Pelayanan Sosial Anak Remaja (PSAR) merupakan salah satu unit pelaksanaan teknis yang berada di bawah naungan Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Sumatera Utara yang memiliki fungsi untuk memberikan pelayanan sosial kepada remaja putus sekolah, atau mengalami permasalahan sosial agar mampu hidup mandiri dan terhindar dari masalah sosial bagi dirinya dan lingkungannya. Serta dapat mengembangkan potensi yang dimiliki sehingga dapat melaksanakan fungsi sosial secara wajar.

UPT Pelayanan Sosial Anak Remaja Tanjung Morawa ini juga memiliki prinsip bahwa anak remaja putus sekolah bukanlah suatu halangan untuk dapat berkarya, setiap orang yang apabila bersedia belajar dan bekerja patut mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh perlakuan yang layak dan setara didalam masyarakat.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PEMBINAAN ANAK PUTUS SEKOLAH DI UPT. PELAYANAN SOSIAL ANAK REMAJA TANJUNG MORAWA”**.

1.2 Rumusan Masalah

Menurut Soehartono (2004: 23) rumusan masalah merupakan langkah yang penting, karena langkah ini menentukan kemana suatu penelitian diarahkan. Maka berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan , yang menjadi rumusan masalah dalam pembahasan ini adalah :

1. Bagaimana implementasi kebijakan pelaksanaan program pembinaan keterampilan bagi anak putus sekolah di UPT pelayanan sosial anak remaja Tanjung Morawa ?
2. Apa saja faktor pendorong dan penghambat kebijakan dalam pelaksanaan program bimbingan keterampilan bagi anak putus sekolah di UPT pelayanan sosial anak remaja Tanjung Morawa ?

1.3 Tujuan penelitian

1. Mengetahui kebijakan pelaksanaan program pembimbingan keterampilan bagi anak putus sekolah di UPT pelayanan sosial anak remaja Tanjung Morawa?
2. Mengetahui apa saja faktor pendorong dan penghambat kebijakan dinas sosial dalam pelaksanaan program bimbingan keterampilan bagi anak putus sekolah di UPT pelayanan sosial anak remaja Tanjung Morawa?

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang akan diperoleh dalam penelitian ini adalah :

Secara Teoritis :

1. Sebagai bahan informasi tentang data empiris yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.
2. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memperkuat kebenaran teori tentang model pembinaan yang tepat bagi anak putus sekolah di kota Medan.

Secara Praktis

1. Penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk evaluasi terhadap pelaksanaan model pembinaan terhadap anak putus sekolah.
2. Dapat memberikan solusi dalam mencari pengembangan model pembinaan anak putus sekolah melalui UPT-PSAR yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan serta harapan anak putus sekolah.
3. Membantu anak agar dapat mengembangkan sikap sosial di lingkungan sekitarnya.

Secara Akademis atau Bagi Fakultas

Memperbanyak referensi karya ilmiah yang menyangkut Implementasi Kebijakan dalam menangani anak putus sekolah.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Implementasi

2.1.1 Pengertian Implementasi

Implementasi adalah tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun dengan matang, cermat dan terperinci. Jadi, implementasi dilakukan jika sudah ada perencanaan yang baik dan matang atau sebuah rencana yang telah disusun jauh-jauh hari sebelumnya, sehingga sudah ada kepastian dan kejelasan akan rencana tersebut. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Yaitu suatu kegiatan yang di rencanakan serta dilaksanakan dengan serius dan mengacu pada norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Menurut Gordon dalam Deddy Mulyadi (2016 : 24) implementasi berkenaan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Dalam hal ini administrator mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasi dan menetapkan kebijakan yang telah diseleksi.

Menurut Guntur Setiawan (2004) Implementasi adalah perluasan dari aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan serta tindakan dengan tujuan untuk menggapainya juga diperlukan jaringan pelaksana berokrasi yang efektif.

2.1.2 Tahapan Implementasi

Menurut George C Edwards III dalam Agustino (2014:149-152) Menyatakan bahwa terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan Implementasi suatu kebijakan yaitu :

1. Komunikasi.

Komunikasi merupakan salah satu variable penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik.

Implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan. Informasi yang di ketahui para pengambil keputusan hanya bisa di dapat melalui komunikasi yang baik. Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan variable komunikasi.

2. Sumber daya.

Sumber daya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik. Indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauh mana sumber daya mempengaruhi implementasi kebijakan terdiri dari:

a. Staf : Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya di sebagian kankan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, atau pun tidak kompeten dibidangnya.

Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak mencukupi, tetapi di perlukan pula kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang di inginkan oleh kebijakan itu sendiri.

b. Informasi : Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu pertama, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan

kebijakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.

c. Wewenang : Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik.

d. Fasilitas : Fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tidak akan berhasil.

3. Disposisi.

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam prakteknya tidak terjadi bias. Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variable disposisi, menurut George C. Edward III, adalah :

a. Pengangkatan birokrat, disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi.

b. Insentif, Edward menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif.

4. Struktur Birokrasi.

Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya kerja sama banyak pihak. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidak efektifan dan menghambat jalannya pelaksanaan kebijaksanaan. Maka memahami struktur birokrasi merupakan faktor yang fundamental untuk mengkaji implementasi kebijakan publik.

Dua karakteristik, menurut Edward III, yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi/ organisasi kearah yang lebih baik, adalah :

a. *Standar Operating Prosedures* (SOP), adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (pelaksana kebijakan/administrator/birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pada tiap hari sesuai dengan standar yang ditetapkan (standar minimum yang dibutuhkan warga).

b. Fragmentasi; adalah upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja.

2.2 Pengertian Kebijakan

Kebijakan adalah suatu ucapan atau tulisan yang memberikan petunjuk umum tentang penetapan ruang lingkup yang memberi batas dan arah umum kepada seseorang untuk bergerak. Secara etimologis, kebijakan adalah terjemahan dari kata *policy*. Kebijakan dapat juga berarti sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.

Kebijakan dapat berbentuk keputusan yang dipikirkan secara matang dan hati-hati oleh pengambil keputusan puncak dan bukan kegiatan-kegiatan berulang yang rutin dan terprogram atau terkait dengan aturan-aturan keputusan. Sering diperdebatkan apa perbedaan antara kebijakan dengan kebijaksanaan. Ini terjadi, karena dua kata ini, kebijakan dan kebijaksanaan, sama-sama belum dibakukan kedalam bahasa Indonesia.

Dalam pengertian kedua kata ini masih belum disepakati penggunaannya. Menurut Anderson dalam Tahir (2014:12), kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah.

Menurut Ealau dan Prewit (Suharto, 2010:7), kebijakan adalah “sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang menaatinya”.

2.3 Proses Kebijakan

Menurut Winarno (2007:29), menyatakan bahwa masing-masing alternatif bersaing untuk dipilih sebagai kebijakan dalam rangka untuk memecahkan masalah. Keputusan kebijakan merupakan puncak dari berbagai keputusan yang dibuat selama proses kebijakan itu berlangsung.

Pada saat proses kebijakan bergerak kearah proses pembuatan keputusan, maka beberapa usul akan diterima sedangkan usul yang lain akan ditolak dan tawar-menawar akan terjadi hingga akhirnya dalam beberapa hal, keputusan kebijakan hanya formalitas.

Untuk membuat keputusan kebijakan ada beberapa tahap yang perlu dilakukan yaitu :

1. Tahap Perumusan

Mengenali dan merumuskan masalah merupakan langkah yang paling fundamental dalam sebuah kebijakan.

2. Tahap Agenda Kebijakan

Tidak semua masalah masuk ke dalam agenda kebijakan. Masalah-masalah tersebut saling berkompetisi antara satu dengan yang lain, misalnya apakah masalah tersebut mempunyai dampak besar bagi masyarakat dan membutuhkan penanganan yang harus segera dilakukan.

3. Tahap Pemilihan Alternatif Kebijakan untuk Memecahkan

Masalah

Tahap ini perumusan kebijakan akan dihadapkan pada pertarungan kepentingan antar berbagai faktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan.

4. Tahap Penetapan Kebijakan

Alternatif kebijakan diambil pada dasarnya merupakan kompromi dari berbagai kelompok kepentingan yang terlibat dalam pembentukan undang-undang, keputusan presiden, keputusan-keputusan kementerian dan lain sebagainya.

2.4 Program Pelatihan

2.4.1 Pengertian Program

Kata program berasal dari bahasa Inggris "*programe*" yang artinya acara atau rencana. Secara konseptual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, program diartikan sebagai rancangan mengenai asas serta usaha yang akan dijalankan oleh seseorang atau suatu kelompok tertentu. Secara umum pengertian

program adalah penjabaran dari suatu rencana. Dalam hal ini program merupakan bagian dari perencanaan. Sering pula diartikan bahwa program adalah kerangka dasar dari pelaksanaan suatu kegiatan.

Program adalah kata, ekspresi, atau pernyataan yang disusun dan dirangkai menjadi satu kesatuan prosedur, yang berupa urutan langkah, untuk menyelesaikan masalah yang diimplementasikan.

Joan L. Herman yang dikutip oleh Farida (2008:9) mengemukakan definisi program sebagai “segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang dengan harapan akan mendatangkan hasil atau pengaruh”.

2.4.2 Pengertian Pelatihan

Pelatihan yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah suatu usaha untuk pembinaan kepribadian yang mandiri dan sempurna serta dapat bertanggungjawab, atau suatu usaha, pengaruh, perlindungan dalam bantuan yang di berikan kepada anak yang tertuju kepada kedewasaan anak itu, atau lebih cepat untuk membantu anak agar teliti dalam melaksanakan tugas hidup sendiri, pengaruh itu datangnya dari orang dewasa (diciptakan oleh orang dewasa seperti sekolah, buku pintar hidup sehari-hari, bimbingan dan nasehat yang memotivasinya agar giat belajar), serta ditujukan kepada orang yang belum dewasa.

Menurut Widodo (2015: 82), pelatihan merupakan serangkaian aktivitas individu dalam meningkatkan keahlian dan pengetahuan secara sistematis sehingga mampu memiliki kinerja yang professional di bidangnya. Pelatihan adalah proses pembelajaran yang memungkinkan pegawai melaksanakan pekerjaan yang sesuai dengan standar.

2.5 Pengertian Sumber daya

Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja. Sumber daya walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif.

Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

2.6 Pengertian Anak

Anak adalah seseorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan [keturunan](#) kedua, di mana kata "anak" merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa. Berdasarkan UU Peradilan Anak. Anak dalam UU No.3 tahun 1997 tercantum dalam pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: “ Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah . Kelangsungan hidup bangsa kedepan berada di tangan anak-anak di masa sekarang. Jika menginginkan kesenangan dimasa yang akan datang maka anak juga memperoleh hak di masa sekarang. Misalnya tempat bermain, pendidikan, jaminan kesehatan, dan lain sebagainya. Sebagai perwujudan rasa tanggung jawab terhadap kelangsungan hidup bangsa. Anak merupakan bagian dari generasi muda, penerus cita-cita, dan perjuangan bangsa.

Disamping itu, anak merupakan sumber daya manusia yang perlu mendapatkan perhatian dan perlindungan dari berbagai ancaman dan gangguan agar supaya hak-hak tidak terabaikan.

Pada kenyataan di masyarakat tidak semua kebutuhan untuk anak terpenuhi. Salah satunya di bidang pendidikan. Di dalam pendidikan Terdapat banyak anak putus sekolah (formal). Keadaan lingkungan yang kurang mendukung, ekonomi, geografi, sosial ekonomi menjadi faktor penyebab anak putus sekolah. Putus sekolah bukan merupakan salah satu permasalahan pendidikan yang tak pernah berakhir. Masalah ini telah berakar dan sulit untuk dipecahkan.

2.7 Pengertian Remaja Putus sekolah

Menurut Gunawan (2010: 71), menyatakan putus sekolah merupakan predikat yang di berikan kepada mantan peserta didik yang tidak mampu menyelesaikan suatu jenjang pendidikan, sehingga tidak dapat melanjutkan studinya ke jenjang pendidikan berikutnya. Putus sekolah yang di maksud adalah berhentinya siswa secara terpaksa dari suatu Lembaga Pendidikan tempat dia belajar. Anak putus sekolah adalah terlantarnya anak dari sebuah Lembaga Pendidikan formal, yang disebabkan oleh berbagai faktor.

Berdasarkan beberapa definisi dapat di ambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan anak putus sekolah adalah keadaan dimana seseorang yang usianya seharusnya masih dalam usia sekolah namun harus keluar atau berhenti dari lembaga pendidikan yang diikuti.

Berdasarkan pengertian diatas, remaja yang mengalami putus sekolah termasuk dalam kategori anak dan remaja terlantar. Remaja putus sekolah yang dimaksud adalah anak yang berusia antara 17 tahun sampai dengan 21 tahun yang

sudah tidak melanjutkan sekolahnya dikarenakan suatu sebab orang tuanya kurang mampu dan atau melalaikan kewajiban sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhannya dengan wajar terutama dalam hal pendidikan.

2.8 Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah

Faktor penyebab anak putus sekolah terdiri dari beberapa faktor antara lain seperti kondisi ekonomi kurang baik, tingkat pendidikan yang tidak terlalu di utamakan, keadaan sarana dan prasarana yang kurang mendukung, dan motivasi atau minat anak untuk bersekolah yang rendah. Selain itu, Menurut Risqa, (2015:14) faktor lingkungan tempat tinggal anak dan lingkungan bermain juga sangat berpengaruh terhadap berlangsung pendidikan anak.

2.8.1 Faktor yang mempengaruhi anak putus sekolah

Anak putus sekolah tentu tidak akan terlepas dari beberapa hal yang mempengaruhi sehingga tidak dapat menyelesaikan sekolah, wajar saja terjadi karena anak di hadapkan oleh beberapa kendala, baik yang datang dari diri sendiri maupun yang datang dari luardari anak yaitu lingkungan.

Hal-hal yang mempengaruhi anak itu antara lain adalah latar belakang pendidikan orang tua, lemahnya ekonomi keluarga, kurang minat anak untuk sekolah, kondisi lingkungan tempat tinggal anak, serta pandangan masyarakat terhadap pendidikan.

2.9 Implementasi pembinaan anak putus sekolah

Keberadaan remaja putus sekolah perlu mendapatkan perhatian dari berbagai pihak. Remaja yang mengalami putus sekolah membutuhkan bimbingan untuk mempersiapkan mereka masuk dalam dunia kerja ataupun melanjutkan sekolahnya kembali.

Keberadaan remaja putus sekolah perlu mendapatkan perhatian dari berbagai pihak. Remaja yang mengalami putus sekolah membutuhkan bimbingan untuk mempersiapkan mereka masuk dalam dunia kerja ataupun melanjutkan sekolahnya kembali. Keberadaan remaja putus sekolah perlu mendapatkan perhatian dari berbagai pihak. Remaja yang mengalami putus sekolah membutuhkan bimbingan untuk mempersiapkan mereka masuk dalam dunia kerja ataupun melanjutkan sekolahnya kembali. Seperti yang diungkapkan Santrock (2003:265), pendekatan yang bisa dipertimbangkan oleh institusi masyarakat adalah mengarahkan kembali pendidikan kejuruan agar mereka memperoleh keterampilan-keterampilan dasar yang dibutuhkan sejumlah besar pekerjaan, dan jaminan untuk bias melanjutkan pendidikan, pekerjaan, atau pelatihan, khususnya yang berhubungan dengan program bimbingan.

Di Indonesia, pelayanan sosial yang diberikan bagi remaja putus sekolah biasanya berupa pembinaan di dalam panti. Dalam proses pembinaan tersebut, remaja putus sekolah akan di berikan bimbingan. Bimbingan-bimbingan yang diberikan antara lain: bimbingan mental agama, bimbingan sosial dan fisik, bimbingan keterampilan dan Praktek Belajar Kerja (PBK).

Membangun moral atau karakter anak bangsa bukan hanya tanggung jawab orang tua dan guru di sekolah tetapi juga tanggungjawab pemimpin masyarakat. Keberadaan anak putus sekolah perlu mendapat perhatian dari berbagai pihak. Remaja yang mengalami putus sekolah membutuhkan bimbingan untuk mempersiapkan mereka masuk dalam dunia kerja atau pun melanjutkan sekolah kembali.

Seperti yang diungkapkan Santrock (2003:265), pendekatan yang bias dipertimbangkan oleh institusi masyarakat adalah mengarahkan kembali pendidikan kejuruan agar mereka memperoleh keterampilan-keterampilan dasar yang di butuhkan sejumlah besar pekerjaan, dan jaminan untuk bias melanjutkan pendidikan, pekerjaan, atau pelatihan.

Khususnya yang berhubungan dengan program bimbingan keterampilan, seperti contoh keterampilan menjahit, salon, dan otomotif. Pelayanan pembinaan sosial yang di berikan bagi remaja putus sekolah biasanya berupa pembinaan didalam panti.

Dalam proses pembinaan tersebut, remaja putus sekolah akan diberikan bimbingan. Bimbingan-bimbingan yang diberikan antara lain: bimbingan mental agama, bimbingan sosial, fisik, dan bimbingan keterampilan dan Praktek Belajar Kerja (PBK).

2.10 Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang relevan. Hasil penelitian yang relevan sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Murniwati (2015) tentang strategi kebijakan kota Surabaya dalam menangani anak putus sekolah. Metode penilitian merupakan penelitian yuridis sosiologis yaitu dengan cara langsung kelapangan untuk mengumpulkan data primernya, dan menggunakan metode penelitian kualitatif, dan tipe penelitian deskriptif.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan penelitian yaitu menjelaskan tentang strategi kebijakan pemerintah kota surabaya dalam menangani anak putus sekolah. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan wajib mengikuti pendidikan dasar serta pemerintah wajib untuk

membiayainya. Akan tetapi dalam perkembangannya, jumlah angka putus sekolah di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan.

Di sisi lain, jumlah angka putus sekolah di Kota Surabaya mengalami penurunan yang signifikan dari tahun ke tahun. Untuk mengetahui strategi kebijakan pemerintah kota Surabaya dalam menangani anak putus sekolah, dalam hal ini dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Penelitian ini dilaksanakan di lokasi penelitian yaitu kota Surabaya. Informan yang diambil adalah berasal dari Dinas Pendidikan, LSM dan masyarakat umum.

Teknik penentuan informan menggunakan *purposive sampling*, pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Analisa data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil yang diperoleh dari peneliti ini menunjukkan bahwa strategi kebijakan pemerintahan kota Surabaya dilakukan dengan menggunakan kombinasi-kombinasi strategi ekspansi dan transformasi.

Dimana strategi ini memang ditujukan bagi peningkatan status, kapasitas, serta sarana-sarana yang berdampak mampu memberi sentuhan warna masa depan keorganisasian yang selaras zaman. Di kombinasikan dengan adanya kebutuhan dari organisasi untuk memenuhi tekanan internal dan eksternal yang pada prinsipnya dilakukan demi terjadinya perubahan fundamental. Strategi ekspansi berupa kebijakan preventif atau pencegahan anak agar tidak sampai putus sekolah seperti Beasiswa atau Bantuan Operasional Daerah (BOPDA), jalur masuk Mitra Warga. Untuk strategi transformasi memberikan fasilitas program non formal seperti PKBM, Kerja paket.

2. Penelitian yang relevan. Hasil penelitian yang relevan sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Friska Winati Sianturi (2013) tentang efektifitas program pelatihan keterampilan bagi anak remaja putus sekolah Di UPT Pelayanan Sosial Anak Remaja Tanjung Morawa. Metode penelitian merupakan penelitian yuridis sosiologis yaitu dengan cara langsung kelapangan untuk mengumpulkan data primernya, dan menggunakan metode penelitian kualitatif, dan tipe penelitian deskriptif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses dan efektifitas pelaksanaan program keterampilan dan bimbingan sosial terhadap remaja putus sekolah di Pelayanan Sosial Anak Remaja (PSAR) Tanjung Morawa yang diharapkan memberikan menjadikan mereka mandiri dengan keterampilan yang mereka miliki serta mengembalikan keberfungsian sosial mereka. Hasil analisis data yang dilakukan dapat diketahui bahwa pelayanan program keterampilan dan bimbingan sosial yang diberikan oleh PSAR Tanjung Morawa sudah efektif dalam mensejahterakan dan memandirikan anak binaan yakni dengan cara memberikan keterampilan, memulihkan fungsi sosial anak binaan dengan baik, dan melatih kemandirian warga binaan mereka.

Kesimpulan: Proses pemberian pelayanan program keterampilan dan bimbingan sosial yang dilakukan oleh Pelayanan Sosial Anak Remaja (PSAR) Tanjung Morawa terhadap warga binaan, khususnya bagi remaja putus sekolah ini dinilai sudah efektif, dimana warga binaan yang mengikuti program pelayanan keterampilan dan bimbingan sosial tersebut, merasa mudah memahami dan mengerti dalam setiap proses pelayanan program keterampilan dan bimbingan sosial yang diberikan, . Pelayanan program keterampilan dan bimbingan sosial di

PSAR Tanjung Morawa sudah efektif karena apa yang menjadi tujuan dari kegiatan pelayanan sosial dan pembinaan tersebut dapat dicapai dengan baik sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya.

Saran : Proses pemberian pelayanan program keterampilan dan bimbingan sosial yang dilakukan oleh Pelayanan Sosial Anak Remaja (PSAR) Tanjung Morawa terhadap warga binaan, khususnya bagi remaja putus sekolah ini diharapkan lebih diperbaiki dalam hal pemberian materi dan latihan, agar sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, sehingga tidak ada materi yang tertinggal, sehingga waktu selama 6 bulan dapat dipergunakan seefektif mungkin. Pelayanan Sosial Anak Remaja (PSAR) Tanjung Morawa diharapkan dapat meningkatkan lagi kualitas pelayanan program keterampilan, serta menambah dan melengkapi sarana dan prasarana yang kurang guna menunjang khususnya pada program pelayanan program keterampilan dan pada kegiatan olahraga yang dilakukan agar lebih efektif dan efisien.

2.11 Kerangka Pemikiran

Program pembinaan anak putus sekolah adalah pelaksanaan pembelajaran peserta didik dalam mengikuti pelatihan atau pembinaan anak putus sekolah. Program pembinaan anak putus sekolah ini memberikan kesempatan bagi pemuda-pemudi yang usia masih produktif untuk berkreasi dan berkarya. Selain itu, dengan adanya program ini mereka merasa sangat terbantu dan menjadi pribadi yang siap menghadapi tantangan dimasa yang akan datang. Program ini juga dapat mengubah cara berpikir anak remaja tentang pentingnya Pendidikan untuk masa depan.

Program yang sudah terlaksana yaitu pelatihan dalam bidang menjahit, salon, dan otomotif. Pelatihan terhadap anak putus sekolah tersebut di jalankan selama 6 bulan membuat mereka memiliki keterampilan dasar. Program ini diharapkan tetap berjalan dan lebih mendapat perhatian bagi pemerintah untuk mendorong semangat setiap kepribadian anak putus sekolah tersebut.

Pelaksanaan pelayanan sosial bagi remaja putus sekolah merupakan proses pelayanan untuk mengembalikan peranan sosial penerima manfaat sehingga mereka dapat menjalankan tugas-tugas kehidupan sesuai dengan perannya. Peranan sosial yang berbasis lembaga atau sering dikenal dengan pelayanan sosial di dalam panti menurut Kurniasari dkk (2009: 19) adalah sebagai berikut:

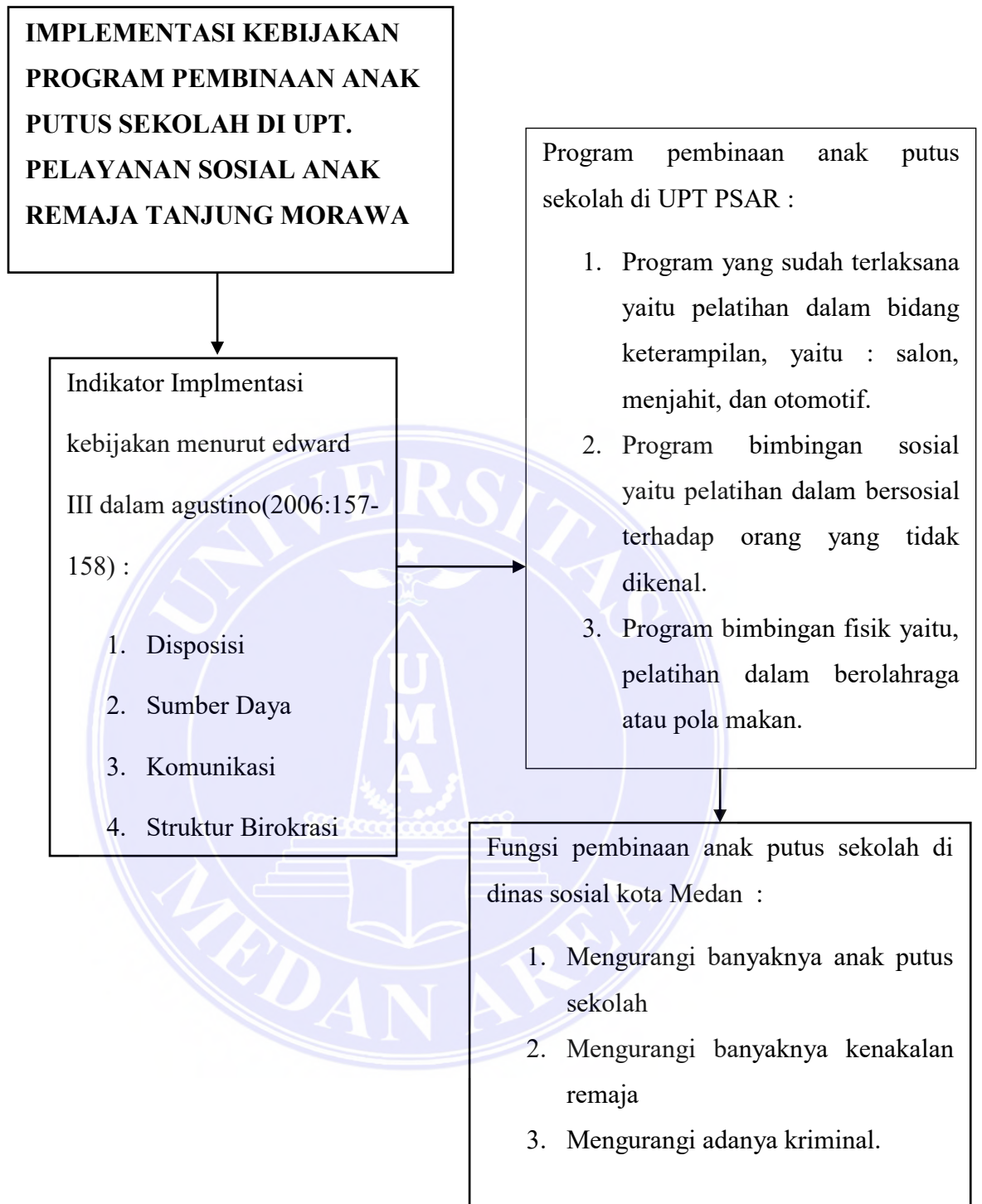
- a. Bimbingan fisik, meliputi kegiatan olahraga.
- b. Bimbingan mental, meliputi :
 - 1. Memberikan kesempatan menentukan pilihan sesuai dengan bakat dan minat penerima manfaat.
 - 2. Pemberian pelayanan Pendidikan kecerdasan.
- c. Bimbingan sosial, meliputi :
 - 1. Bermain, rekreasi serta pemanfaatan waktu luang.
 - 2. Membina relasi dan kedekatan.
 - 3. Memberikan peluang partisipasi penerima manfaat dalam mengungkapkan perasaannya.
- d. Bimbingan keterampilan kerja.

Dalam bimbingan keterampilan kerja ini akan di berikan sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki oleh penerima pelayanan. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan mereka menghadapi dunia kerja yang selain membutuhkan sikap

dan kepribadian yang baik juga harus di dukung oleh keterampilan. Banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk menangani remaja putus sekolah. Salah satunya adalah dengan memberikan pelayanan sosial system panti melalui Pelayanan Sosial Bina Remaja (PSBR). Setiap provinsi di Indonesia memiliki PSBR yang berada di bawah naungan Dinas Sosial Provinsi.

Buku Standar Pelayanan Sosial PSBR yang diterbitkan oleh Direktorat Pelayanan Sosial Anak (2008) mengatakan bahwa PSBR memiliki peranan atau tugas yaitu memberikan perlindungan, pelayanan, dan rehabilitas social bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial remaja putus sekolah. Tujuan pelayanan sosial di PSBR adalah untuk memperbaiki keberfungsian social remaja putus sekolah agar nanti mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka dan keluarga tanpa harus bergantung dengan orang lain.

Berikut ini skema pemikiran untuk mempermudah dalam memahami penelitian yang di kembangkan penulis secara sistematis :



Gambar 1.1

Skema kerangka berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis, Sifat, Lokasi, dan Waktu Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memilih metode penelitian kualitatif yaitu dengan melakukan penggambaran dan menguraikan keadaan yang sebenarnya terjadi berdasarkan fakta dan berusaha mencari jalan pemecahannya.

Menurut Sugiyono (2014:9) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *post positivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

3.1.2 Sifat Penelitian

Sifat pada penelitian ini adalah deskriptif. Menurut Sugiyono (2005:21) menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetap tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat dan tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan, sikap, pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.

3.1.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di kantor Dinas Kesejahteraan dan Sosial Provinsi Sumatera Utara (UPT Pelayanan Sosial Anak Remaja) Tanjung Morawa Jl. Industri No. 47 Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang.

3.1.4 Waktu Penelitian

Dalam penyusunan proposal ini, penulis telah menentukan jadwal penelitian sesuai dengan yang tertera pada Tabel 1. Berikut ini:

Tabel 1.1 Jadwal dan Tahapan Penelitian

No	Uraian Kegiatan	Mei		Juni				Juli				Agustus				September				Desember			
		2019		2019				2019				2019				2019				2019			
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan Proposal																						
2	Seminar Proposal																						
3	Perbaikan Proposal																						
4	Pengambilan data/ Penelitian																						
5.	Penyusunan Skripsi																						
6.	Seminar Hasil																						
7.	Perbaikan Skripsi																						
8.	Sidang Meja Hijau																						

Sumber: Dikelola Oleh Penulis Tahun (2019)

3.2 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah seseorang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian, informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti.

Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini yaitu:

1. Informan kunci, yaitu orang-orang yang sangat memahami permasalahan yang diteliti. Adapun yang dimaksud sebagai informan kunci dalam penelitian ini adalah kepala UPT-PSAR (Panti Sosial Anak Remaja) Tanjung Morawa yaitu Drs. Alia Gani Manurung, M.AP
2. Informan utama, yaitu orang yang dianggap mengetahui permasalahan yang diteliti. Adapun yang dimaksud sebagai informan utama adalah pegawai UPT-PSAR (Panti Sosial Anak Remaja) yaitu Dra. Mayam Ginting.
3. Informan Tambahan, yaitu orang-orang yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat maupun langsung terlibat didalamnya yaitu masyarakat dan anak putus sekolah tersebut.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural *setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta wawancara mendalam dan dokumentasi. Catherine Marshall, Gretchen B. Rossman dalam Sugiyono, (2008:310) menyatakan bahwa “*the fundamental methods relied on by qualitative researchers for gathering information are, participation in the setting, direct observation, in-depth interviewing, document review*”.

1. Observasi

Catherine Marshall dalam Sugiyono (2008:310) menyatakan bahwa *“through observation, the reseacher learn about behavior and the meaning attached to those behavior”*. Melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut.

Menurut Sutrisno dalam Sugiyono, (2015: 203) mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses Biologis dan Pshikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.

2. Wawancara

Esterberg dalam Sugiyono (2008: 317) mendefinisikan wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Susan Stainback dalam Sugiyono, (2008: 318) jadi, dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bias ditemukan melalui observasi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu pengumpulan data dengan cara melakukan analisis terhadap semua catatan dan dokumen yang dimiliki oleh organisasi yang terpilih sebagai objek penelitian, atau data dari individu sebagai objek penelitian.

4. Triangulasi

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.

Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.

3.4 Teknik Analisa Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai.

Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel.

Miles dan Huberman (Sugiyono, 2008:337), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu Reduksi data, Penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

1. Reduksi data

Mereduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya serta membuang yang tidak perlu.

Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data.

2. Penyajian data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun, dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. Dalam hal ini Miles dan Huberman (Sugiyono, 2008:341) untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks bersifat naratif. Setelah data disajikan, maka dilakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Untuk itu diusahakan untuk mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering muncul, dan lain sebagainya. Jadi dari data tersebut diusahakan untuk mengambil suatu kesimpulan verifikasi dapat dilakukan dengan keputusan, didasarkan pada reduksi data, dan penyajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian.

3. Penarikan Kesimpulan

Langka ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang ditemukan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya maka pada bagian ini penulis mencoba mengambil beberapa kesimpulan dari penelitian yang penulis amati, serta memberikan saran atau masukan sebagai hasil dari penelitian ini.

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa :

1. Implementasi Kebijakan pelaksanaan program pelatihan keterampilan dalam memberdayakan remaja di UPT Panti Sosial Bina Remaja sudah terlaksana dengan baik adapun jenis pelatihannya terdiri dari 4 jenis keterampilan yaitu : keterampilan menjahit, keterampilan membordir, keterampilan salon, keterampilan otomotif. Dalam pelaksanaan program pelatihan tersebut memiliki 3 tahap yaitu : 1) tahap persiapan pelaksanaan, terdiri dari 6 jenis yaitu karakteristik peserta pelatihan dan cara perekrutannya, karakteristik instruktur dan perekrutannya, sarana dan prasarana, alokasi waktu, materi pembelajaran, dan metode pembelajaran, 2) tahap proses pelaksanaan meliputi : (a) pendahuluan yang berisi pemberian motivasi, bina suasana, tanggapan dari peserta pelatihan, dan sosialisasi tata tertib, (b) langkah-langkah pelatihan terdiri dari pemberian materi teori, pendampingan, dan materi praktek, (c) refleksi meliputi sharing dan membuat perencanaan untuk pertemuan berikutnya. dan 3) tahap evaluasi dengan menggunakan 2 jenis evaluasi yaitu evaluasi teori dan praktek yang dilakukan melalui praktek kerja lapangan. Dampak dari pelaksanaan program dalam memberdayakan remaja

di UPT Pelayanan Sosial Anak Remaja yaitu : 1) bagi pengelola dan instruktur, ada rasa kepuasan tersendiri karena melihat anak didiknya berhasil dan dapat mandiri di dalam masyarakat sehingga tujuan yang ada sudah terpenuhi, 2) bagi peserta pelatihan, dapat menambah keterampilan yang bisa digunakan untuk bekerja dan membuka peluang usaha sehingga peserta pelatihan bisa lebih mandiri.

2. Faktor pendorong program pelatihan dalam memberdayakan remaja di UPT Panti Sosial Anak Remaja yaitu : 1) Kontak dengan kebudayaan lain, baik yang terbentuk difusi, akulturasi, maupun asimilasi unsur-unsur kebudayaan dari luar yang masuk. 2) Sistem pendidikan formal yang baru pendidikan memberi nilai nilai tertentu bagi manusia, terutama dalam membuka pikirannya serta menerima hal –hal baru dan cara berpikir secara ilmiah. pendidikan memiliki faktor yang mendorong terjadinya perubahan. 3) Sikap menghargai hasil karya seseorang dan keinginan-keinginan untuk maju. Apabila sikap tersebut sudah melembaga dan memasyarakat, maka masyarakat merupakan pendorong bagi usaha –usaha penemuan baru.

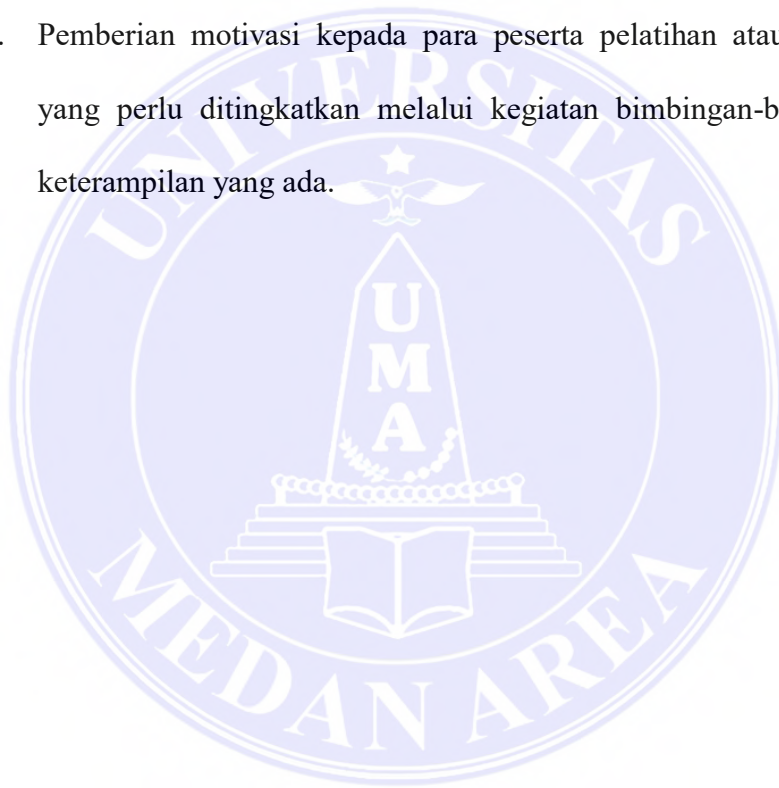
Faktor penghambat program pelatihan remaja putus sekolah di UPT Pelayanan Sosial Anak Remaja dalam memberdayakan remaja yaitu : 1) Tingkat Pendidikan yang kurang , 2) latar belakang kehidupan sosial ekonomi, 3) Kemauan dari diri sendiri atau kemampuan anak yang berbeda-beda dalam menerima pelatihan.

5.2 Saran

Berdasarkan pada simpulan diatas maka diajukan beberapa saran sebagai berikut :

Bagi pihak UPT Pelayanan Sosial Anak Remaja Tanjung Morawa

- a. Selalu menjalin hubungan baik dengan pihak-pihak terkait dan mitra kerja (Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Kepolisian) agar pelatihan sejenis dapat terus terlaksana.
- b. Pemberian motivasi kepada para peserta pelatihan atau anak binaan yang perlu ditingkatkan melalui kegiatan bimbingan-bimbingan dan keterampilan yang ada.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Dariyo, Agoes.(2004). *Psikologi Perkembangan Remaja*. Bogor Selatan: Ghalia Indonesia.
- Darwin. 1999. *Implementasi Kebijakan*. Yogyakarta : pusat penelitian Kependudukan UGM.
- Erlangga Kusumah Inu Hardi. 2008. *Psikologi perkembangan :Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, Jakarta.
- Farida, Joan . 2008. Program sebagai segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang . Dasar Jakarta : Bumi Aksara.
- Gunawan.(2010), *menyatakan putus sekolah merupakan predikat yang diberikan Kepada mantan peserta didik yang tidak mampu menyelesaikan suatu Jenjang pendidikan*.
- Imron, Ali. (2002). *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: PT BumiAksara.
- Kurnia sari Dkk.(2009).*program pembinaan yang berbasis Lembaga atau sering Dikenal denagan pelayanan sosial*. Bandung
- Mangunhardjana., A. 1986. *Pembinaan, arti dan metodenya*, kanisius Mediacom, Jakarta.
- Mulyadi,Deddy. 2016. *Studi kebijakan publik dan pelayanan publik*. Bandung : Alfabeta.
- Risqa, (2015).*Faktor lingkungan tempat tinggal anak dan lingkungan bermain juga sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan Pendidikan anak*. Jakarta
- Tahir, Anderson, 2014, *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaran Pemerintah Daerah*, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Santrock, John W. (2003). *Adolescence Perkembangan Remaja*. Jakarta:Erlangga.
- Setiawan,Guntur.2004.*Implementasi adalah perluasan dari aktivitas*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- Silalahi, Ulber. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung : PT. Refika Aditama
- Soetarso. 1997. *Kesejahteraan Sosial, Pelayanan Sosial dan Kebijakan Sosial*: Bandung.
- Suharto, Ealau dan Pewitt, 2010.*Kebijakan adalh sebuah ketetapan yang berlaku*. Jakarta: Handal Niaga Pustaka
- Suhersono.2005.*istilah bordir diambil dari bahasa inggris “Embroidery” yang artinya sulaman*.Yogyakarta: Pustaka belajar.
- Sugiyono.2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta
- _____.2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Albeta
- Widodo.2015.*pelatihan merupakan serangkaian aktivitas individu*. Bandung:CV Pustaka Pelajar.
- Winarno.2007. *kebijakan dalam rangka memecahkan masalah*. Yogyakarta : MedPress.
- Wowosunaryokusman,singer.2013.*keterampilan adalah derajat keberhasilan yang Konsisten*:Jakarta.

Jurnal

Murniwati.(2015).Strategi kebijakan pemerintahan kota Surabaya dalam menangani anak putus sekolah. UNIVERSITAS AIRLANGA Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Jurusan Administrasi Negara. Vol.2 No.3

FriskaWinatiSianturi(2013).efektifitas program pelatihan keterampilan bagi anak remaja putus sekolah di UPT. Pelayanan Sosial Anak Remaja Tanjung Morawa. UNIVERSITAS SUMATERA UTARA Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Jurusan Administrasi Negara. Vol.2 No.1

SUMBER LAIN

Sosial Anak. Depsos RI. (2008). Standar Pelayanan Sosial Panti Sosial Bina Remaja (PSBR). Jakarta.

Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan tentang Mencerdaskan Kehidupan Bangsa.

Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang - undang. No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah.

Undang-undang No. 35 tahun 2004 atas perubahan dari UU nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No. 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1988 tentang usaha kesejahteraan bagi anak-anak putus sekolah.

Perda Provinsi Sumatera Utara No 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pelayanan sosial bagi anak terlantar dan putus sekolah.

Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesejahteraan dan Sosial Provinsi Sumatera Utara.

Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 33 Tahun 2010 tentang Organisasi, Tugas, fungsi dan Uraian Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesejahteraan dan Sosial Provinsi Sumatera Utara.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS SOSIAL
UPT PELAYANAN SOSIAL ANAK REMAJA DINAS SOSIAL TANJUNG MORAWA
JL. INDUSTRI NO 47 TANJUNG MORAWA

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
NO. 463.1 / 162 B / UPT PSAR / IX / 2019

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Alia Gani Manurung, M.AP
NIP : 19740330 199402 1 002
Pangkat/Gol. : Pembina Tk. I / IV b
Jabatan : Kepala UPT PSAR Tanjung Morawa

Dengan ini menerangkan bahwa saudara:

Nama : Indah Bertua Sianturi
Nfn : 15850037
Jurusan : Administrasi Publik

Telah melaksanakan Penelitian dari tanggal 05 s/d 30 Agustus 2019 di UPT Pelayanan Sosial Anak Remaja Tanjung Morawa. Dalam rangka untuk penyusunan skripsi.
Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung Morawa, 09 September 2019

Mengetahui,
Kepala UPT PSAR Tanjung Morawa
Dinas Sosial Tanjung Morawa



Drs. ALIA GANI MANURUNG, M.AP

PEMBINA TK. I
NIP. 19740330 199402 1 002



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate/Jalan PBSI Nomor 1 (061) 7366878, 7360168, 7364348, 7366781, Fax. (061) 7366998 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A, (061) 8201994, Fax. (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 641 /FIS.2/01.10/VII/2019
Lamp : -
Hal : Pengambilan Data/Riset

16 Juli 2019

Yth,
Ka. Dinas Sosial UPT. Pelayanan Sosial
Jl. Industri Nomor 47 Simpang Sinalko Tanjung Morawa, Medan

Dengan hormat,

Bersama ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan rekomendasi dan kesempatan kepada mahasiswa kami dengan data sebagai berikut :

Nama : Indah Bertua Sianturi
N P M : 158520037
Program Studi : Administrasi Publik

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/riset ke Dinas Sosial UPT. Pelayanan Sosial, dengan judul Skripsi **"Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Anak Putus Sekolah Di UPT. Pelayanan Sosial Anak Remaja Tanjung Morawa"**

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian dimaksud adalah semata-mata untuk tulisan ilmiah dan penyusunan skripsi, ini merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa tersebut untuk mengikuti ujian sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area

Selanjutnya kami mohon kiranya dapat memberikan kemudahan dalam pengambilan data yang diperlukan dan surat keterangan yang menyatakan bahwa mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data pada Instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



CC : File,-



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/10/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)1/10/20